

PRESIDEN JOKOWI TINJAU STOK BERAS DAN SERAHKAN BANTUAN PANGAN DI KABUPATEN BUNGO



Sumber gambar: https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/04/04/jokowi-tinjau-dan-bagikan-bantuan-pangan-ke-warga-penerima-manfaat-di-bungo-jambi_169.jpeg?w=700&q=90

Hari kedua di Provinsi Jambi, pada Kamis, 4 April 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, untuk meninjau langsung ketersediaan beras. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima manfaat dan menyapa dengan penuh semangat.

"Pagi-pagi wajahnya cerah semuanya, senyum semuanya, padahal puasa-puasa," ucap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satunya, melalui pemberian bantuan pangan berupa beras. "Ini yang keempat, nanti akan dilanjutkan ke bulan berikutnya sampai bulan Juni," ungkap Presiden.

Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan bantuan pangan tersebut. Namun, kebijakan tersebut masih akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan akan diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho," tutur Presiden.

Sementara itu, Khoirul Anwar, salah seorang warga penerima manfaat, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan pangan tersebut sangat membantu saat harga beras sedang naik.

"Ya sangat membantu, soalnya sekarang posisi harga beras melambung tinggi kan, jadi (bantuan) ini cukup membantu kita. Ini sudah keempat kalinya, alhamdulillah sungguh-sungguh sangat membantu," ucap Khoirul Anwar. Senada, Asmirawati, warga lainnya, juga turut berbagi kebahagiaan. Melalui bantuan pangan tersebut, anggarannya untuk membeli beras dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

"Beras di pasar naik meningkat, uangnya tidak mampu untuk membeli. Sekarang sudah dapat beras ya syukur alhamdulillah kita tidak beli lagi," tutur Asmirawati. Asmirawati turut berharap bantuan yang diberikan dapat terus berlanjut. Hal tersebut karena bantuan pangan dinilai memberikan banyak manfaat nyata bagi dirinya dan masyarakat lain.

"Mudah-mudahan minta sama Pak Jokowi untuk yang akan datang bantuannya tidak akan habis-habis, dapat bantuan terus," tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Bupati Bungo Mashuri. (BPMI Setpres)

Sumber berita:

1. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tinjau_stok_beras_dan_serahkan_bantuan_pangan_di_kabupaten_bungo, "Presiden Jokowi Tinjau Stok Beras dan Serahkan Bantuan Pangan di Kabupaten Bungo", 04 April 2024;
2. <https://news.detik.com/berita/d-7277731/jokowi-tinjau-stok-beras-dan-serahkan-bantuan-pangan-di-bungo-jambi>, "Jokowi Tinjau Stok Beras dan Serahkan Bantuan Pangan di Bungo Jambi", 04 April 2024.

Catatan:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan Bank. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat

sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.

Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Bank Penyalur adalah Bank Umum Milik Negara. Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial mencakup seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat diberdakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial. Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial dapat diakses melalui Kartu Kombo.¹ Besar manfaat, jumlah penerima dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.² Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dapat dikecualikan bagi:

- a. Penyandang disabilitas berat;
- b. Lanjut usia terlantar non potensial;
- c. Eks penderita penyakit kronis non potensial;
- d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
- e. Daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.³

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

- a. Mudah dijangkau;
- b. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini;
- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT, yaitu:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

¹ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4).

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

- b. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
- d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.